



| 2023



KABUPATEN KOLAKA TIMUR



<http://www.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

2023

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kolaka Timur 2023

Katalog BPS : 4102004.7411
ISBN : -
Nomor Publikasi : 74110.2326

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 56 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur

Penerbit:

© BPS Kabupaten Kolaka Timur

Pencetak:

-

Sumber Ilustrasi:

Canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kolaka Timur 2023

Penanggung Jawab:

Burhanuddin, SE., M.Si

Penyunting:

Khodijah Kamilatul Muslimah, SST

Pengolah Data:

BPS

Penulis naskah:

Khodijah Kamilatul Muslimah, SST

<https://koltimtimor.bps.go.id>

Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kolaka Timur 2023 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka Timur yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kolaka Timur antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS maupun Dinas atau Badan terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Sensus Penduduk 2020-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, Pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, Kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Tirawuta, Desember 2023
Kepala BPS Kabupaten
Kolaka Timur



Burhanuddin, SE., M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
SINGKATAN DAN AKRONIM	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. TUJUAN	4
1.3. RUANG LINGKUP	4
1.4. SUMBER DATA	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB 2. KEPENDUDUKAN	7
2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin	10
2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	12
2.3. Angka Beban Ketergantungan	14
2.4. Status Perkawinan	18
2.5. Kepemilikan Kartu Identitas	21
BAB 3. KESEHATAN	23
3.1 Status Kesehatan Masyarakat	26
3.2 Akses Pelayanan Kesehatan	28
3.3 Kesehatan Ibu dan Anak	31
BAB 4. PENDIDIKAN	37
4.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	40
4.2. Tingkat Pendidikan	41
4.3. Tingkat Partisipasi Sekolah	43
BAB 5. PERUMAHAN	45
5.1 Kepemilikan Rumah	48
5.2 Sumber Air	50
5.3 Sanitasi	53

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur, 2020-2023	11
Tabel 2.2.	Persentase dan Kepadatan di Kabupaten Kolaka Timur, 2022	13
Tabel 2.3.	Persentase Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif, dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Kolaka Timur, 2021-2023.....	15
Tabel 2.4.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2021-2023	19
Tabel 2.5.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	20
Tabel 2.6.	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Karakteristik di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	22
Tabel 3.1.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	27
Tabel 3.2.	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	30
Tabel 3.3.	Persentase Anak Berumur 0-23 Bulan Menurut Pemberian ASI dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	31
Tabel 4.1.	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2020-2022	41
Tabel 4.2.	Persentase Penduduk 15 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	42

Tabel 4.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2022-2023	43
Tabel 5.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	49
Tabel 5.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2022	50
Tabel 5.3.	Persentase Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Pendidikan Tertinggi KRT di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2022	54

<https://koltimkab.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2021-2023	12
Gambar 2.2.	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	16
Gambar 2.3.	Persentase Penduduk Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	17
Gambar 2.4.	Persentase Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	17
Gambar 2.5.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	18
Gambar 2.6.	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Karakteristik di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	21
Gambar 3.1.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	28
Gambar 3.2.	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	29
Gambar 3.3.	Rata-rata Lamanya Pemberian ASI di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	32
Gambar 3.4.	Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Buku KIA/KMS atau Kartu Berobat/Dokumen Lain yang Tertulis Tanggal Imunisasi di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023.....	33
Gambar 3.5.	Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Buku KIA/KMS dan Pernah Mendapat	34

Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Kolaka Timur
(Persen), 2023.....

Gambar 3.6.	Persentase balita (umur 0-59 bulan) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	35
Gambar 5.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/lainnya di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	51
Gambar 5.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/lainnya di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	52
Gambar 5.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023	53

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
MA	Madrasah Aliyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
SAKERNAS	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	Total Fertility Rate (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka



BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Kesejahteraan rakyat adalah salah satu prioritas kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur seperti yang tertuang dalam Visi Kabupaten Kolaka Timur, yaitu **“Sejahteran Bersama Masyarakat Kolaka Timur yang Agamis, Maju, Mandiri dan Berkeadilan”**. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai program telah dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam berbagai bidang, seperti bidang Kesehatan, Pendidikan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan politik dan bidang lainnya. Hasil pembangunan yang telah dilakukan tersebut diharapkan telah dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur.

Tidak dapat dipungkiri, adanya keragaman sumber daya, keadaan geografis potensi alam di daerah tersebut sampai pada keragaman budaya dan adat istiadat, mengakibatkan beragam pula pencapaian hasil-hasil pembangunan antar wilayah. Oleh sebab itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan taraf kesejahteraan rakyat, lebih khusus dalam publikasi ini adalah taraf kesejahteraan rakyat Kabupaten Kolaka Timur. Sehingga program pembangunan berikutnya dapat lebih dioptimalkan.

Proses pembangunan dalam suat pemerintahan merupakan usaha jangka panjang yang memerlukan data penunjang untuk setiap tahap kebijakan. Sebagai Pembina data dan instansi vertikal yang telah diamanatkan oleh Presiden sebagai penyedia data utama, Badan Pusat Statistik (BPS) senantiasa berupaya menghasilkan data berkualitas yang akurat dan muktahir. Yang mana data terbut dapat digunakan oleh pemangku jabatan di lingkung pemerintah daerah sebagai pijakan dasar untuk membuat kebijakan dan merumuskan program-program pemerintah. Sumber informasi utama mengenai berbagai indicator kesejahteraan

rakyat berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS. Disamping itu juga didukung dengan data proyeksi penduduk Indonesia 2015-2025.

1.2. TUJUAN

Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kolaka Timur 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat. Data yang disajikan diharapkan dapat menggambarkan taraf hidup dan perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2023. Yang selanjutnya dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai dasar perumusan kebijakan maupun evaluasi program pembangunan daerah.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup publikasi ini mencakup data dan informasi berbagai aspek kesejahteraan rakyat pada level kabupaten kondisi Maret 2023. Aspek kesejahteraan yang dianalisis pada publikasi ini adalah kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, perumahan, taraf dan pola konsumsi, serta kemiskinan. Beberapa data disajikan dalam series tiga tahun untuk memperkaya makna pada data-data tertentu.

1.4. SUMBER DATA

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2023. Susenas merupakan salah satu kegiatan survei yang dirancang oleh BPS dengan maksud untuk mengumpulkan data yang dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan mencakup bidang kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, perumahan, konsumsi/pengeluaran dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Data ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai indikator pencapaian kesejahteraan rakyat.

Susenas Maret 2023 dilakukan terhadap 540 rumah tangga yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur. Data kependudukan yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil kegiatan Sensus Penduduk Tahun 2020

1.5. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Kependudukan, berisi analisis berbagai indikator kependudukan di Kabupaten Kolaka Timur kondisi tahun 2023.

Bab 3 Kesehatan, berisi analisis berbagai indikator kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur kondisi tahun 2023.

Bab 4 Pendidikan, berisi analisis berbagai indikator pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur kondisi tahun 2023.

Bab 5 Perumahan, berisi analisis berbagai indikator perumahan di Kabupaten Kolaka Timur kondisi tahun 2023.



BAB 2

KEPENDUDUKAN



Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, informasi kependudukan merupakan salah satu data yang strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan melainkan sekaligus sebagai pelaksana pembangunan itu sendiri. Atas dasar pemikiran tersebut, pembangunan suatu wilayah termasuk pembangunan daerah dititikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM diperlukan karena jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset pembangunan jika kualitasnya baik. Namun sebaliknya, bisa pula menjadi beban pembangunan Ketika kualitasnya rendah.

Kualitas SDM yang rendah dapat terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali serta tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan akan Pendidikan serta Kesehatan yang layak. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana Kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana Pendidikan yang terbatas

Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata dapat menjadi masalah di waktu mendatang

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Persebaran, kepadatan, komposisi, dan struktur penduduk merupakan informasi penting yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan suatu daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam bab ini akan diuraikan berbagai indikator kependudukan di Kabupaten Kolaka Timur kondisi tahun 2023.

2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah berkaitan erat dengan kondisi kependudukannya. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keberadaan dan kebutuhan penduduk di wilayahnya.

Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dalam periode 4 tahun terakhir. Tabel 2.1 memperlihatkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kolaka Timur, serta rasio jenis kelamin dari tahun 2020 sampai 2023 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020. Pada tahun 2020, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 120,33 ribu jiwa. Dengan adanya perubahan kondisi, demografi seperti kelahiran, kematian dan migrasi penduduk menyebabkan jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2023, jumlah penduduk menjadi 125,77 ribu jiwa.

Secara umum penduduk di Kabupaten Kolaka Timur lebih didominasi oleh kaum Laki-Laki. Hal ini dapat dijelaskan melalui indikator rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) pada tabel 2.1. Dalam 4 tahun terakhir, rasio jenis kelamin bernilai diatas 100 dimana angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Pada tahun 2023, rasio jenis kelamin

penduduk Kabupaten Kolaka Timur sebesar 105, artinya setiap 100 penduduk perempuan, ada sebanyak 105 penduduk laki-laki. Data mengenai rasio jenis kelamin bermanfaat dalam pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender. Sebagai contoh, informasi rasio jenis kelamin diketahui oleh para politisi dalam mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

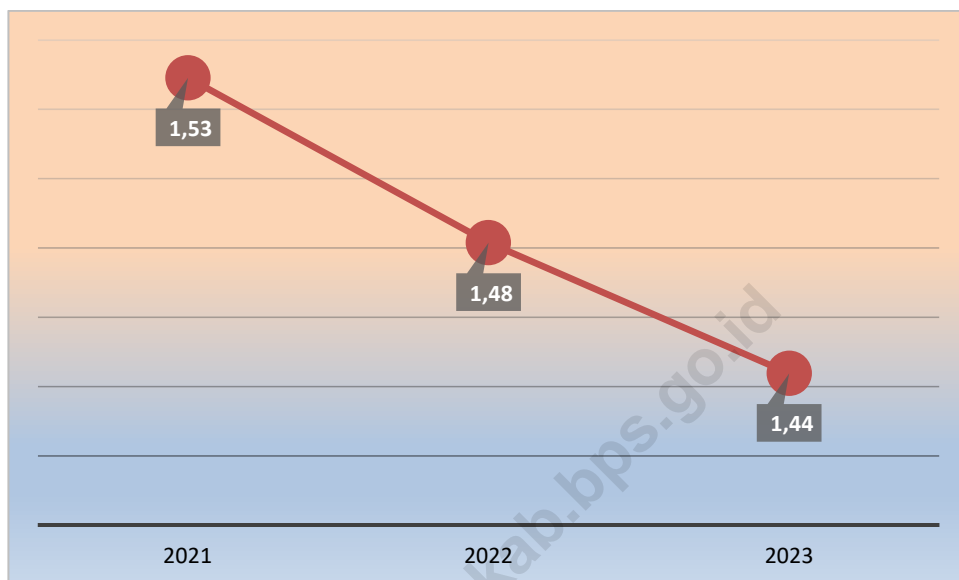
Tabel 2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur, 2020-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	120,33	-	106
2021	122,17	1,53	106
2022	123,98	1,48	105
2023	125,77	1,44	105

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Laju pertumbuhan penduduk dari 2020-2023 sebesar 1,48 %. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kolaka Timur setiap tahunnya terus menurun. Jika diamati selama empat tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk terus menunjukkan perlambatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kolaka Timur sebesar 1,53%, kemudian tahun 2022 sebesar 1,48% dan tahun 2023 sebesar 1,44%. Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa pertumbuhan penduduk cukup terkendali, jumlah penduduk yang terus bertambah diimbangi dengan laju pertumbuhan yang melambat setiap tahunnya.

Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2021-2023



Sumber: BPS, Hasil Proyeksi SUPAS 2015

2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Kolaka Timur yaitu masalah distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk juga terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk besar, sementara di wilayah lain masih ada yang hanya dihuni oleh penduduk yang relatif sedikit. Hal ini berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Persebaran dan kepadatan penduduk menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduknya. Persebaran penduduk yang tidak merata mengindikasikan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antara daerah *rural* (perdesaan) dan *urban* (perkotaan). Tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan tidak merata bisa mengakibatkan penyediaan fasilitas umum menjadi reaktif tidak tepat guna. Di samping itu, kepadatan yang terlampau tinggi juga akan memicu permasalahan

dalam penyediaan sarana dan prasarana serta dapat memicu konflik sosial di masyarakat.

Kecamatan Lambandia adalah kecamatan dengan persentase penduduk terbesar (16,20%) dan terpadat (173 jiwa per km²)

Selama ini persebaran penduduk di Kabupaten Kolaka Timur tidak merata antar kecamatan. Berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020, penduduk terbanyak berada di wilayah kecamatan Lambandia dengan persentase penduduk sebesar 16,24% dari total penduduk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022, dengan tingkat kepadatan sebesar 93. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ladongi dengan nilai 129. Nilai tersebut artinya terdapat 129 jiwa penduduk per 1 km² di Kecamatan Ladongi. Kondisi ini sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan Kecamatan Ueesi. Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 menunjukkan pada tahun 2022 persentase penduduk di Kecamatan Ueesi sebesar 2,99% dengan kepadatan penduduk hanya 2 jiwa per 1 km². Data persentase dan kepadatan penduduk tahun 2022 menurut kecamatan dapat dilihat lebih rinci pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Persentase dan Kepadatan di Kabupaten Kolaka Timur, 2022

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
(1)	(2)	(3)
Aere	6,97	28
Lambandia	16,24	93
Poli-Polia	9,13	67
Dangia	7,02	77
Ladongi	15,18	129
Loea	6,02	83

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
(1)	(2)	(3)
Tirawuta	13,94	61
Lalolae	3,82	77
Mowewe	7,07	66
Tinondo	7,45	26
Uluiwoi	4,17	18
Ueesi	2,99	2
Kolaka Timur	100,00	30

Sumber: Publikasi Kabupaten Kolaka Timur Dalam Angka 2023

Kepadatan penduduk dalam bahasan ini tidak mempertimbangkan wilayah pemukiman dengan wilayah bukan pemukiman. Oleh karena itu, luasnya Kawasan hutan sangat mempengaruhi hasil perhitungan indikator ini. Di Kabupaten Kolaka Timur, Kecamatan Ueesi yang memiliki kepadatan terendah memiliki Kawasan hutan yang luasnya lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Perkembangan distribusi dan kepadatan penduduk dari tahun ke tahun perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan. Masalah yang sering timbul akibat ketimpangan distribusi dan kepadatan penduduk umumnya berhubungan dengan perumahan, kesehatan dan keamanan.

2.3. Angka Beban Ketergantungan

Meninjau lebih jauh mengenai kondisi kependuduk di Kabupaten Kolaka Timur, dapat diperoleh analisis mengenai Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) yang merupakan salah satu indikator demografi yang cukup penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam membiayai konsumsi makanan dan bukan makanan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tahun 2023, proporsi penduduk belum produktif (0-14) dan tidak produktif lagi (65+) terhadap keseluruhan penduduk di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 30,34% dan proporsi penduduk usia produktif (15-64) sebesar 69,66%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kelompok usia produktif masih mendominasi di Kabupaten Kolaka Timur.

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif, dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Kolaka Timur, 2021-2023

Penduduk	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Usia Produktif	69,67	69,70	69,66
Usia Tidak Produktif	30,33	30,30	30,34
Angka Beban Ketergantungan	43,53	43,46	43,56

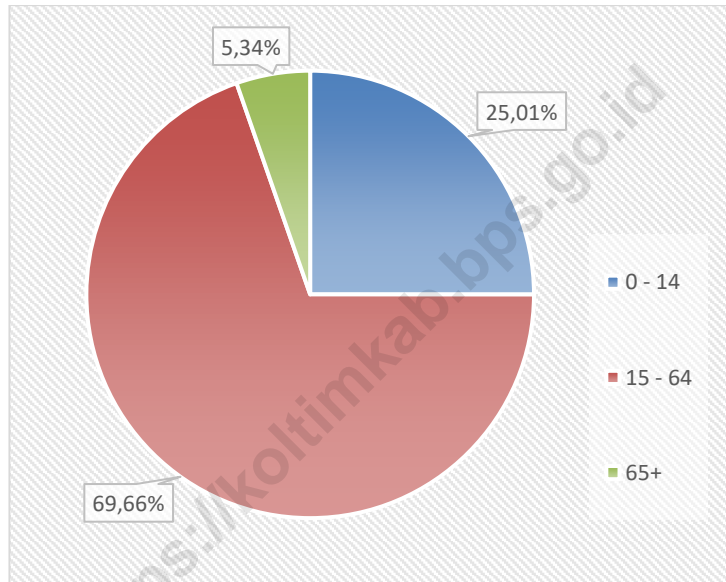
Sumber: Olahan Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020-2035

Angka beban ketergantungan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2022 ke 2023 mengalami kenaikan. Rasio ketergantungan 2023 sebesar 43,56% berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung biaya konsumsi (makanan dan bukan makanan) sekitar 43 sampai 44 jiwa penduduk usia tidak produktif. Semakin kecil rasio ketergantungan di suatu wilayah, maka akan memperbesar peluang wilayah tersebut memperoleh keuntungan demografi yang dikenal dengan istilah 'bonus demografi'. Bonus demografi dapat didefinisikan sebagai kondisi menguntungkan bagi pembangunan daerah karena tingginya jumlah penduduk usia produktif yang menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif.

Penduduk kelompok usia produktif merupakan aset yang sangat berharga karena diharapkan dapat menopang ekonomi dalam keluarga atau secara gamblang mereka diharapkan dapat menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, dalam skala yang lebih luas. Dominasi keberadaan penduduk usia

produktif diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tempat tinggalnya. Ditambah dengan kemajuan teknologi dimana penduduk usia produktif lebih cepat bisa beradaptasi, diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan kemajuan suatu daerah.

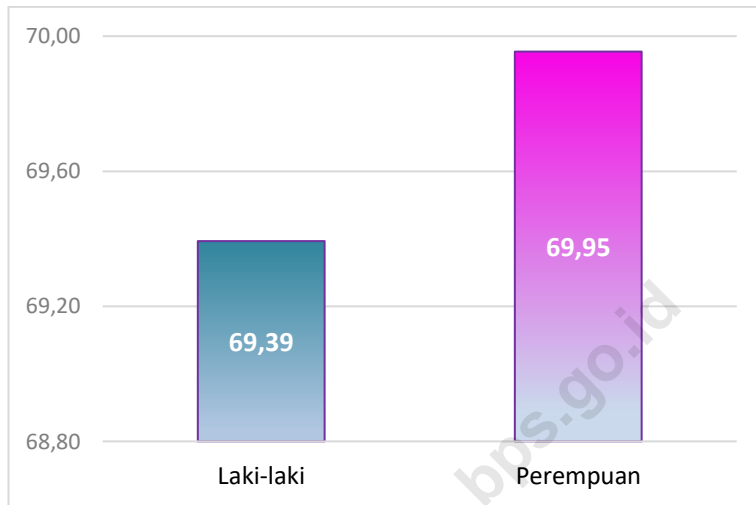
Gambar 2.2. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020-2035

Dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti tercermin pada gambar 2.2 di atas. Sebesar 69,66% penduduk di Kabupaten Kolaka Timur berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun). Selanjutnya 25,01% berada pada kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan 5,34% berada pada kelompok usia tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Lebih besarnya persentase penduduk usia produktif diharapkan dapat mengurangi beban ketergantungan, yang berarti dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya, baik itu kebutuhan makanan maupun kebutuhan bukan makanan. Dengan demikian akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi mereka untuk meningkatkan kualitas dirinya.

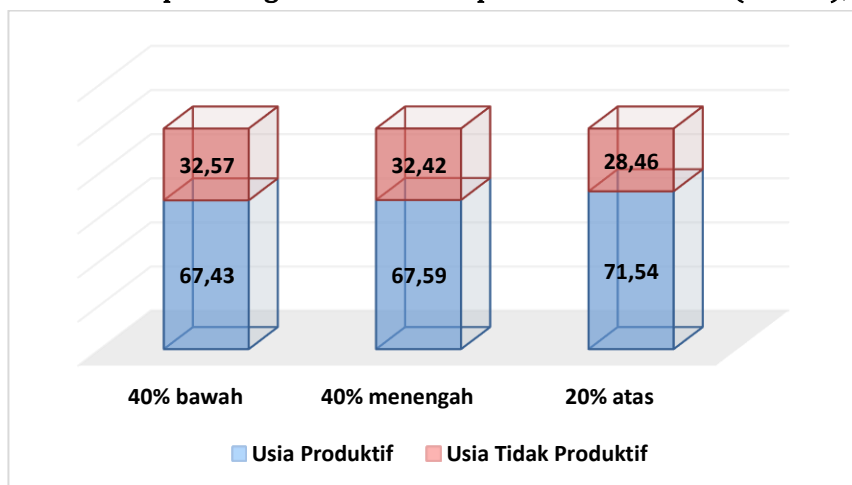
Gambar 2.3. Persentase Penduduk Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020-2035

Bila dianalisis lebih lanjut mengenai komposisi penduduk usia produktif menurut jenis kelamin, terlihat pada Gambar 2.3 bahwa persentase penduduk laki-laki yang berada pada kelompok usia produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk perempuan di Kabupaten Kolaka Timur. Adapun besarnya yaitu, penduduk laki-laki yang berada pada kelompok usia produktif tahun 2022 sebesar 68,88%, sedangkan penduduk perempuan usia produktif sebesar 67,32%.

Gambar 2.4. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023

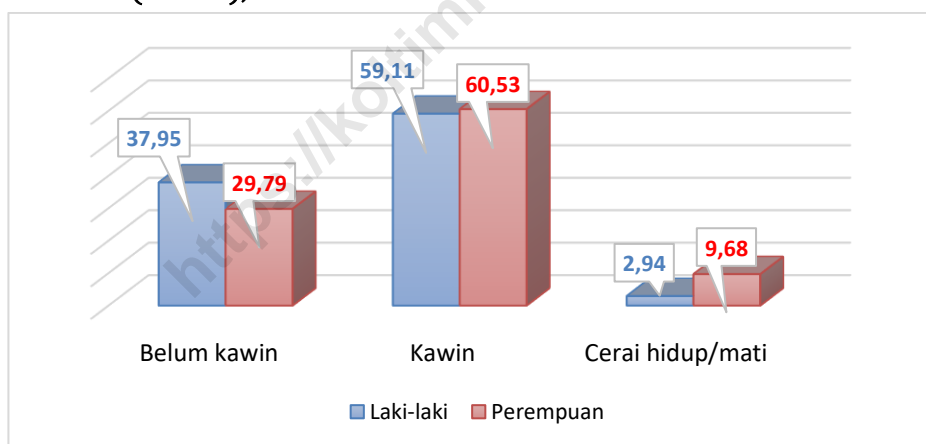


Sumber: BPS, Olahan Hasil Susenas Maret 2023

Ketika dikelompokkan antara penduduk usia produktif dengan penduduk tidak produktif, proporsi penduduk usia produktif masih selalu lebih besar dibandingkan yang tidak produktif. Baik itu saat ditinjau menurut jenis kelamin maupun kelompok pengeluaran. Proporsi penduduk usia produktif selalu melebihi setengahnya (diatas 50%). Dominasi penduduk usia produktif di berbagai kelompok ini diharapkan mampu menopang dan mendorong percepatan pergerakan ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Mulai dari kelompok masyarakat berpengeluaran rendah hingga kelompok masyarakat berpengeluaran tinggi.

2.4. Status Perkawinan

Gambar 2.5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Tabel 2.4 berisi informasi persentase penduduk menurut status perkawinan dan jenis kelamin di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2023. Komposisi penduduk menurut status perkawinan menunjukkan bahwa persentase penduduk di Kabupaten Kolaka Timur yang berstatus belum kawin pada kelompok laki-laki usia 10 tahun ke atas lebih besar dibanding perempuan pada kelompok usia yang sama, yaitu 37,95% berbanding 29,79%. Sementara itu penduduk yang berstatus kawin pada kelompok perempuan usia 10 tahun ke atas sebesar 60,53%, lebih

besar dibanding laki-laki yaitu 59,11%. Begitu pula penduduk yang berstatus cerai, persentase pada kelompok perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, baik yang cerai hidup maupun cerai mati. Sebesar 9,68% perempuan kelompok usia 10 tahun ke atas berstatus janda (status perkawinannya cerai mati atau cerai hidup). Sedangkan laki-laki yang berstatus duda (staus perkawinannya cerai mati atau cerai hidup) sebesar 2,94% pada kelompok usia yang sama.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2021-2023

Status Perkawinan	2021		2022		2023	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	34,99	27,20	34,99	27,20	37,95	29,79
	28,29		30,68		33,87	
Kawin	58,97	62,21	58,97	62,21	59,11	60,53
	68,62		62,57		59,82	
Cerai Hidup/Cerai Mati	6,03	10,58	6,03	10,58	2,94	9,68
	3,09		6,75		6,31	

Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Secara total (laki-laki dan perempuan) persentase penduduk yang berstatus cerai (cerai hidup atau cerai mati) mengalami peningkatan di tahun 2021 ke 2022, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan persentase penduduk yang berstatus cerai hidup/cerai mati di Kabupaten Kolaka Timur. Pada tahun 2022, persentase penduduk yang berstatus cerai sebanyak 6,75%, dan pada tahun 2023 turun menjadi 6,31%. Adanya penurunan persentase penduduk 10 tahun keatas dengan status cerai hidup/cerai mati tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat diteliti lebih lanjut.

Data yang tersaji menjadi lebih informatif Ketika mengintegrasikan antara karakteristik status perkawinan dengan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat. Dalam bahasan ini, pengeluaran konsumsi (makanan dan bukan

makanan) merupakan pendekatan untuk memperoleh gambaran pendapatan masyarakat.

Tabel 2.5 memberikan informasi tentang persentase penduduk berumur 10 tahun keatas menurut karakteristik kelompok pengeluaran dan tingkat Pendidikan serta status perkawinan di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2023. Ketika masyarakat usia 10 tahun ke atas dikelompokkan berdasarkan pendapatannya, terlihat pola yang mencolok pada masyarakat berstatus cerai (Tabel 2.4). Persentase tertinggi ada pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran teratas, yaitu mencapai 9,7%. Berdasarkan data tersebut ada indikasi bahwa kecukupan materi tidak selalu sejalan dengan harmonisasi dalam keluarga.

Tabel 2.5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023

Karakteristik	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup/Mati
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelompok Pengeluaran			
40% Terbawah	37	56,48	6,52
40% Menengah	33,88	61,78	4,34
20% Teratas	28,15	62,15	9,7
Pendidikan Tertinggi			
SD ke bawah	36,37	55,8	7,83
SMP ke atas	31,39	63,82	4,79
Total	33,87	59,82	6,31

Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

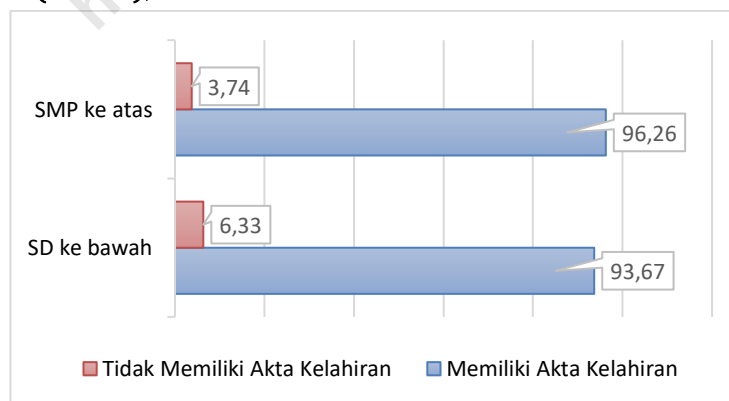
Mengamati keterkaitan antara karakteristik status perkawinan dengan Pendidikan terakhir yang ditamatkan. Berdasarkan data yang tersaji pada table 2.5 di atas, masyarakat usia 10 tahun ke atas yang Pendidikan tertingginya SD ke bawah dan berstatus kawin ada sebanyak 55,8%. Sedangkan pada kelompok

masyarakat dengan Pendidikan tertinggi SMP ke atas, yang berstatus kawin lebih tinggi, yaitu 63,82%. Akan tetapi, jika diamati lebih lanjut untuk kasus cerai hidup/mati, kelompok masyarakat dengan Pendidikan tertingginya SD ke bawah memiliki persentase status cerai lebih tinggi (7,83%) dibandingkan masyarakat dengan Pendidikan tertingginya SMP ke atas (4,79%).

2.5. Kepemilikan Akta Kelahiran

Kelengkapan administrasi penduduk dalam suatu pemerintahan sangatlah penting, karena identitas penduduk tersebut akan terus melekat dan terpakai di segala aspek kehidupan sosial. Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang menunjukkan identitas seseorang. Akta kelahiran diperlukan untuk mendaftarkan seseorang sebagai penduduk di suatu daerah untuk bisa mendapatkan akses ke berbagai layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan program bantuan sosial. Khusus di Indonesia, akta kelahiran biasanya banyak digunakan saat mendaftarkan anak ke sekolah.

Gambar 2.6. Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Karakteristik di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Pada Gambar 2.6 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pendidikan KRT membuat kepemilikan akta kelahiran ART makin tinggi pula. Pada kelompok KRT dengan tingkat pendidikan SD ke bawah memiliki persentase kepemilikan

akta kelahiran yang lebih kecil (93,67%) dibanding kelompok KRT dengan tingkat pendidikan SMP ke atas (96,26%). Hal ini sangat menunjukkan bahwa dengan pendidikan KRT semakin tinggi membuat lebih sadar dan aktif untuk melengkapi dokumen administrasi anggota rumah tangganya.

Tabel 2.6. Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Karakteristik di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023

Karakteristik	Memiliki Akta Kelahiran	Tidak Memiliki Akta Kelahiran
(1)	(2)	(3)
Kelompok Pengeluaran		
40% Terbawah	93,09	6,91
40% Menengah	95,60	4,40
20% Teratas	98,83	1,17
Pendidikan Tertinggi KRT		
SD ke bawah	93,67	6,33
SMP ke atas	96,26	3,74

Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Bila dilihat berdasarkan karakteristik kelompok pengeluaran dalam tabel 2.6, pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40% menengah dan 20% teratas, kepemilikan akta kelahiran mencapai lebih dari 95%, yaitu 95,83% dan 98,83% . Sedangkan pada kelompok masyarakat 40% terbawah, baru sebanyak 93,09% telah memiliki akta kelahiran dan sisanya (6,91%) masih belum memiliki akta kelahiran. Secara umum, Kepedulian masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur terhadap kepemilikan akta kelahiran sudah baik karena lebih dari 90%. Akan tetapi pemerintah daerah masih harus tetap mensosialisasikan pentingnya kelengkapan administrasi. Khususnya akta kelahiran yang akan digunakan saat akan mendaftar sekolah.



BAB 3 KESEHATAN



Penduduk mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, perhatian terhadap penduduk tidak hanya menyangkut kuantitasnya, tetapi juga kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya dilakukan melalui peningkatan taraf Kesehatan. Faktor kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan merupakan salah satu komponen yang diperhatikan dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan. Jaminan Kesehatan yang semakin baik akan meningkatkan kualitas manusia yang baik sehingga meningkatkan produktivitasnya.

Salah satu aspek penting kesejahteraan masyarakat adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat Kesehatan penduduk. Derajat kesehatan penduduk dapat diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*). Angka kesakitan/morbiditas menunjukkan adanya gangguan/keluhan Kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit, yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat Kesehatan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, usaha peningkatan dan pemeliharaan mutu pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian. Misalnya melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan peningkatan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah. Murah dan

merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat Kesehatan masyarakat yang semakin baik. Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tercapai atau tidaknya pembangunan di suatu daerah karena hal tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik secara fisik maupun mental. Daerah yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi derajat Kesehatan dapat diartikan semakin baik kualitas sumber daya manusia, terlebih bila dihubungkan dengan kesehatan ibu dan anak.

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan program, antara lain melalui sosialisasi bidang kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan/asuransi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui BPJS. Semua lapisan masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, murah dan merata sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

3.1 Status Kesehatan Masyarakat

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh perilaku dan pola konsumsi masyarakat terutama dalam upaya preventif dan berbagai keluhan kesehatan. Perilaku dan pola konsumsi ini berkaitan dengan cara serta kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadi pergeseran pola konsumsi yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap Kesehatan. Salah satu indikator derajat kesehatan yaitu keluhan kesehatan yang dialami masyarakat. Termasuk dalam kategori memiliki keluhan kesehatan, Ketika seseorang yang mengalami gangguan Kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut dan kronis (meskipun selama

sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

Berdasarkan Tabel 3.1, angka kesakitan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 11,07% pada tahun 2023. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk, ada 11 sampai 12 orang diantaranya mengalami keluhan kesehatan seperti panas, pilek, diare, sakit kepala, maupun penyakit kronis atau keluhan lainnya hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan ini menurun dibanding tahun sebelumnya dimana angka kesakitan tahun 2022 sebesar 22,06%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kondisi kesehatan penduduk dibanding tahun sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor seperti perbaikan pola makan, pola hidup dan kondisi cuaca.

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki cenderung lebih sedikit yang mengalami keluhan kesehatan, yaitu sebesar 10,63% dari keseluruhan penduduk laki-laki. Sedangkan penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan sebanyak 11,52% dari total penduduk perempuan. Hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk laki-laki relatif lebih sehat dibanding penduduk perempuan.

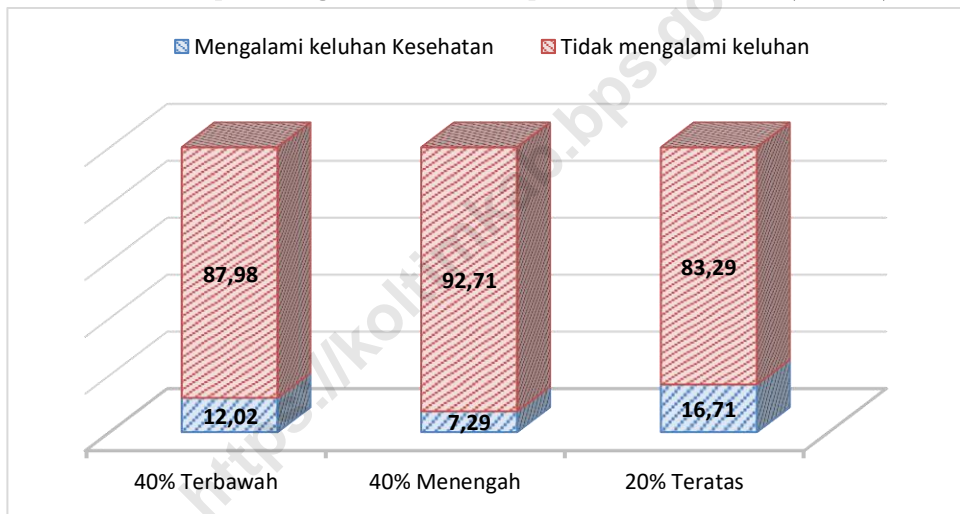
Tabel 3.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023

Karakteristik	Memiliki keluhan kesehatan	Tidak memiliki keluhan kesehatan
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	10,63	89,37
Perempuan	11,52	88,48
Kelompok Pengeluaran		
40% Terbawah	12,02	87,98
40% Menengah	7,29	92,71
20% Teratas	16,71	83,29
Total	11,07	88,93

Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Gambar 3.1 memperlihatkan grafik perbandingan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurut kelompok pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2023. Jika ditinjau berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase penduduk 40% berpengeluaran menengah paling rendah angka kesakitan, yaitu sebesar 7,29. Sedangkan yang paling tinggi persentase mengalami keluhan kesehatan berasal dari kelompok pengeluaran 20% teratas dengan besaran 16,71%.

Gambar 3.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

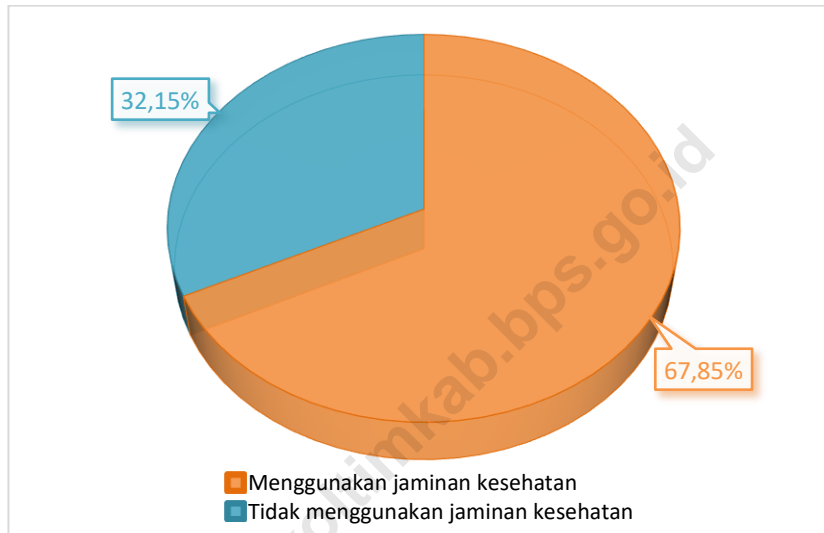
3.2 Akses Pelayanan Kesehatan

Beberapa faktor yang biasanya menjadi pertimbangan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, serta kondisi sosial ekonomi penduduk. Yang dimaksud kondisi sosial ekonomi penduduk adalah bagaimana penduduk mampu membiayai pengobatannya dengan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Pembangunan di bidang kesehatan oleh pemerintah mencakup peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tujuannya adalah agar tersedianya fasilitas yang mudah dan murah diakses bagi seluruh lapisan

masyarakat. Kemudahan yang sudah difasilitasi pemerintah salah satunya yaitu jaminan kesehatan. Berikut data mengenai pemanfaatan jaminan kesehatan oleh masyarakat pada tahun 2023.

Gambar 3.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Diantara masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dan pernah berobat jalan, sebanyak 32 hingga 33 orang dari setiap 100 penduduk telah memanfaatkan kartu jaminan kesehatan dalam mengakses fasilitas kesehatan untuk mengatasi keluhan kesehatan yang dialaminya. Sedangkan sisanya, yakni sebesar 67,85% penduduk tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini tergambar pada grafik 3.2. Berdasarkan data tersebut, masih banyak penduduk yang belum menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Hal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut penyebabnya, apakah karena sulitnya menggunakan jaminan kesehatan tersebut atau memang masih ada penduduk yang membutuhkan jaminan kesehatan justru belum memiliki jaminan kesehatan tersebut.

Tabel 3.2 menunjukkan data persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan menurut kelompok pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2023. Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa

kelompok masyarakat berpenghasilan 20% teratas yang paling besar persentase menggunakan jamkes untuk berobat jalan, yakni sebesar 82,50%, disusul oleh kelompok pengeluaran 40% menengah (78,57%) dan kelompok pengeluaran 40% terbawah (55,06%). Pada tahun 2023, lebih banyak penduduk di Kabupaten Kolaka Timur yang berobat jalan tanpa menggunakan jaminan kesehatan. Penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan paling tinggi adalah kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40% terbawah, yaitu sebesar 55,06%. Hal ini disebabkan kerana kelompok tersebut memiliki persentase keluhan kesehatan yang relatif rendah. Selain itu juga karena membutuhkan biaya transportasi untuk ke fasilitas kesehatan sehingga memilih menggunakan obat alami, seperti rebusan tanaman obat tertentu ataupun membeli obat di warung terdekat.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023

Kelompok Pengeluaran	Menggunakan Jamkes	Tidak Menggunakan Jamkes
(1)	(2)	(3)
40% Terbawah	55,06	44,94
40% Menengah	78,57	21,43
20% Teratas	82,50	17,50
Total	67,85	32,15

Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Selain membutuhkan kartu jaminan kesehatan, ada sisi lain yang juga diperlukan masyarakat, yaitu kemudahan akses pemanfaatan jaminan kesehatan yang sudah mereka terima dalam wujud kartu. Ketersediaan dan tersampainya informasi untuk masyarakat mengenai kemudahan penggunaan layanan kesehatan melalui kartu jaminan kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah masih memerlukan perhatian khusus. Hal ini menjadi penting agar segala bentuk

bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah tidak hanya tepat sasaran, namun juga tepat guna oleh masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya.

3.3 Kesehatan Ibu dan Anak

Ibu yang sedang hamil harus mulai memperhatikan asupan gizi dan juga melakukan imunisasi. Setelah anak lahir, sangat dianjurkan untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Asi adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk perkembangan kecerdasan bayi serta melindungi tubuh bayi dari alergi dan penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah menaungkan agar seorang ibu dapat memberikan asi eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan keatas, dan dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Tabel 3.3. Persentase Anak Berumur 0-23 Bulan Menurut Pemberian ASI dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023

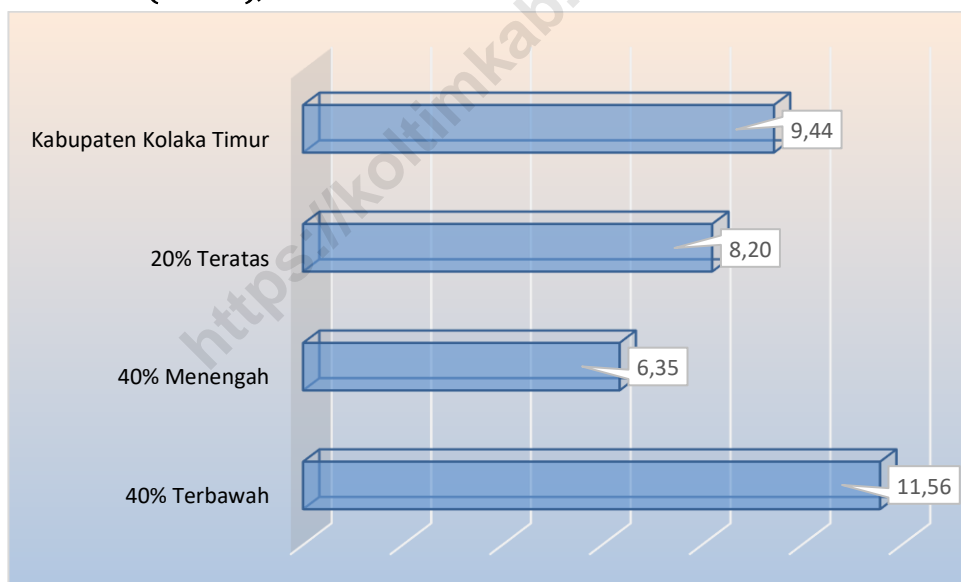
Kelompok Pengeluaran	Pernah Diberi ASI	Tidak Pernah Diberi ASI
(1)	(2)	(3)
40% Terbawah	94,42	5,58
40% Menengah	74,08	25,92
20% Teratas	39,11	60,89
Total	77,98	22,02

Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Berdasarkan Tabel 3.3, persentase anak baduta (usia 0-23 bulan) yang pernah diberi ASI di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2023 sebesar 77,98%. artinya masih ada 22 dari setiap 100 baduta yang sama sekali tidak pernah mendapatkan ASI. Tabel 3.3 juga menjelaskan perilaku pemberian ASI kepada anak baduta yang dikelompokkan menurut tingkatan ekonomi masyarakat. Fenomena menonjol yang terlihat dari tabel tersebut adalah pada kelompok masyarakat 40%

terbawah, dimana memiliki persentase pemberian ASI yang paling tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya, yakni sebesar 94,42%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat, pada kelompok pengeluaran tersebut, akan pentingnya pemberian ASI sudah baik. Namun bila kita melihat angka persentase pemberian ASI pada kelompok pengeluaran 20% teratas sangat rendah, yaitu hanya 39,11%. Angka ini memiliki nilai *relative standard error* (RSE) yang tinggi yaitu 65,55% berdasarkan hasil olahan Susenas Maret 2023. Salah satu penyebab utamanya karena sampel pada kelompok ini sangat kecil sehingga tidak bisa ditarik kesimpulan yang sama untuk kondisi di lapangan.

Gambar 3.3. Rata-rata Lamanya Pemberian ASI di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



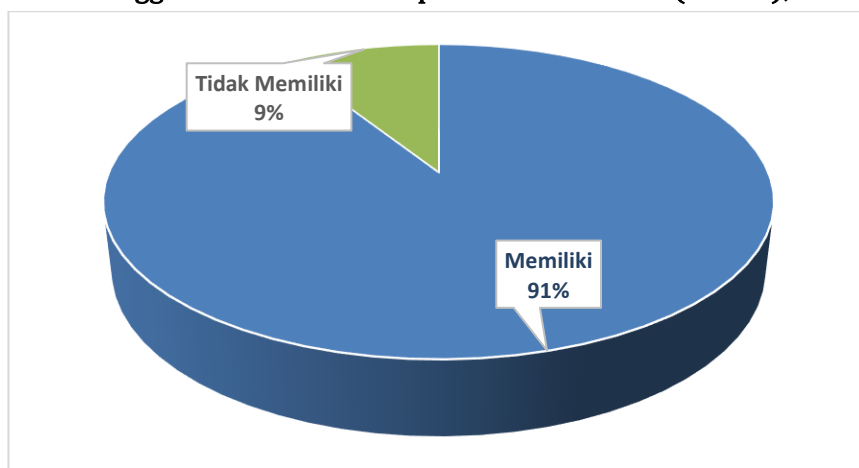
Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Gambar 3.3 memperlihatkan rata-rata lamanya pemberian ASI pada baduta di Kabupaten Kolaka Timur. Secara keseluruhan penduduk Kabupaten Kolaka Timur, rata-rata ibu memberikan ASI kepada anaknya selama 9 hingga 10 bulan. Bila dianalisis lebih lanjut menurut kelompok pengeluaran, masyarakat dengan pengeluaran 40% terbawah menjadi kelompok yang paling lama pemberian ASI nya, yaitu selama 11 sampai 12 bulan. Kemudian diikuti oleh

kelompok pengeluaran 20 % teratas (8 – 9 bulan), dan yang terakhir kelompok pengeluaran 40 % menengah (6-7 bulan). Angka rata-rata lamanya pemberian ASI di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2023 ini masih jauh dari idealnya ASI diberikan, yaitu selama 24 bulan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri, khususnya bagi tenaga kesehatan yang berhubungan dengan gizi dan perkembangan bayi untuk terus mensosialisasikan pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI dan ASI sampai anak berusia 2 tahun.

Buku Kesehatan Anak/Kartu Menuju Sehat merupakan alat untuk mendeteksi secara dini terhadap adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak, sebagai alat komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu dan anak termasuk rujukannya dan paket (standar) pelayanan gizi, imunisasi dan tumbuh kembang balita. Penerapan buku KIA secara benar akan berdampak pada peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga akan kesehatan ibu dan anak, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan sistem monitoring, dan informasi kesehatan.

Gambar 3.4. Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Buku KIA/KMS atau Kartu berobat/Dokumen Lain yang Tertulis Tanggal Imunisasi di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023

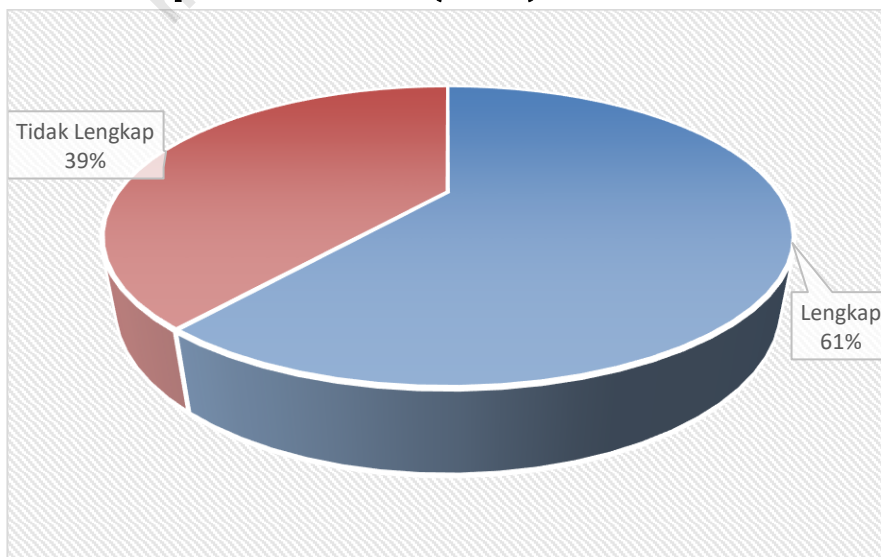


Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Gambar. 3.4 menunjukkan persentase penduduk berumur 0-59 bulan (balita) yang mempunyai buku KIA/KMS atau kartu berobat/dokumen lain yang tertulis tanggal imunisasi di Kabupaten Kolaka Timur. Pada tahun 2023, yang memiliki buku KIA/KMS sebesar 91%, sedangkan sisanya masih belum memiliki buku KIA/KMS atau dokumen lain yang memuat tanggal pemberian imunisasi.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap berbagai penyakit. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap diharapkan akan terlindung dari beberapa penyakit berbahaya dan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Sesuai pedoman WHO, anak dinyatakan telah diimunisasi lengkap apabila telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, tiga kali imunisasi Polio, dan satu kali imunisasi campak. Pemberian imunisasi pada balita seharusnya diberikan secara lengkap dan tepat waktu sebelum bayi berumur satu tahun.

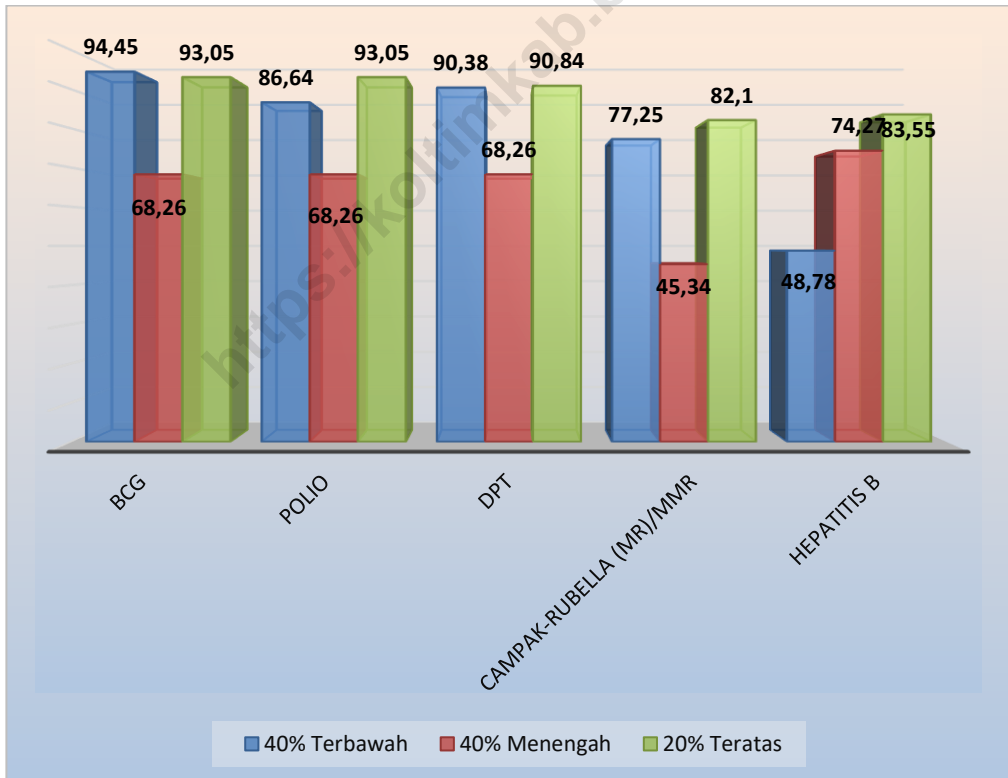
Gambar 3.5. Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan yang Mempunyai Buku KIA/KMS dan Pernah Mendapat Imuniasi Dasar Lengkap di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Gambar 3.5 memberikan informasi persentase balita berumur berumur 0-59 bulan (balita) yang mempunyai buku KIA/KMS atau kartu berobat/dokumen lain yang tertulis tanggal imunisasi dan pernah mendapat imunisasi lengkap di Kabupaten Kolaka Timur. Pada tahun 2023, sebanyak 61% balita telah mendapatkan imunisasi. Nilai ini sudah cukup baik, tetapi masih tetap butuh sosialisasi lebih lanjut oleh pemerintah dan tenaga kesehatan karena masih sekitar 39% balita (umur 0-59 bulan) masih belum mendapatkan imunasi lengkap ataupun belum mendapat imunisasi sama sekali.

Gambar 3.6. Persentase balita (umur 0-59 bulan) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Gambar 3.6 dibawah menunjukkan penerimaan imunisasi oleh balita yang dikelompokkan menurut status ekonomi masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2023. Gambar tersebut menunjukkan pola yang berbeda-beda untuk setiap status ekonomi masyarakat. Namun fenomena yang terlihat, pada kelompok pengeluaran 40% Menengah hampir di semua jenis imunisasi memiliki persentase terendah dibanding kelompok pengeluaran lainnya, yakni imunisasi BCG (68,26%), Polio (68,26%), DPT (68,26%) dan Campak Rubella (MR)/MMR (45,34%). Hanya pada imunisasi Hepatitis B yang menjadi kelompok masyarakat terendah adalah 40% terendah (48,78%). Sedangkan untuk persentase pemberian imunisasi tertinggi berada pada kelompok pengeluaran 20% Teratas, yaitu pada jenis imunisasi BCG (93,05%), Polio (90,84%), DPT (93,05%), Campak (82,10%) dan Hepatitis B (83,55%).

Apa yang ditunjukkan pada Gambar 3.6 tentu saja bukanlah fenomena yang begitu saja bisa diabaikan. Pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40% terbawah pada umumnya memiliki keterbatas ekonomi, lingkungan tempat tinggal yang mungkin tidak terjaga sanitasinya, sehingga balita yang ada di kelompok masyarakat tersebut lebih rentan berada di wilayah yang banyak penyakit atau sulit berobat ketika anaknya sakit karena keterbatasan ekonomi, justru menjadi kelompok yang paling rendah penerimaan imunisasinya hampir di semua jenis imunisasi. Pemerintah dan para kader kesehatan butuh kerja lebih keras untuk bisa menjangkau kelas ekonomi terbawah agar semua balita dapat menerima imunisasi tepat waktu.



BAB 4 PENDIDIKAN



Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap penduduk Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup, sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seluruhnya serta masyarakat madani dan moderen yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, dan ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi

layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam bab ini diantaranya Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

4.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspetasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

Pada tahun 2021, terjadi kenaikan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kolaka Timur bila dibandingkan dengan tahun 2020. HLS naik dari 12.41 menjadi 12.69 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. Kenaikan HLS ini menunjukkan perbaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur.

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang

telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

RLS di Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2022 tercatat sebesar 8,15 tahun. Ini berarti hingga tahun 2022, secara rata-rata penduduk Kabupaten Kolaka Timur usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,15 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun 2020 sebesar 7,56 dan tahun 2021 sebesar 7,84. Meski naik, dari angka tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kolaka Timur yang berusia 25 tahun ke atas putus sekolah di jenjang SMP sederajat.

Pada dasarnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu karena ini merupakan *outcome* dari proses pendidikan. Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas, artinya penduduk yang saat ini diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada RLS beberapa tahun ke depan.

Tabel 4.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,41	12,69	12,69
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,56	7,84	8,15

Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka Timur 2023

4.2. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi akan mempunyai pengetahuan yang luas

serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Semakin meningkatnya keterampilan/keahlian yang dimiliki maka akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk berkerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk 15 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Tidak mempunyai Ijazah	15,41	15,48
SD/ sederajat	28,03	26,79
SMP/ sederajat	24,12	23,12
SMA keatas	32,44	34,61

Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum persentase penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda-beda nilai terbesarnya antar tingkat. Persentase penduduk terbesar yang tidak mempunyai ijazah adalah perempuan dengan persentase 15,48%, sedangkan laki-laki 15,41%. Pada tingkat SD/Sederajat, penduduk berjenis kelamin laki-laki lah yang paling banyak memiliki ijazah SD/ sederajat dengan besaran nilai 28,03%, sedangkan penduduk perempuan sebesar 2679%. Persentase penduduk yang memilki ijazah SMP/Sederajat paling banyak adalah laki-laki dengan nilai 24,12%, sedangkan perempuan hanya 23,12%. Untuk tingkat pendidikan SMA ke atas, perempuan lebih tinggi persentasenya (34,61%) dibanding laki-laki (32,44%). Hal ini memperlihatkan bahwa di tahun 2023,

penduduk perempuan di Kabupaten Kolaka Timur sudah banyak yang menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMA ke atas.

4.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. APS berfungsi untuk menilai pencapaian MDGs, yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS berarti semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Akan tetapi, meningkatnya APS bukan berarti meningkat juga pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APM merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2022-2023

Indikator Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
APS						
7-12 Tahun	98,82	98,94	99,62	99,40	99,22	99,19
13-15 Tahun	96,09	96,25	97,24	96,87	96,61	96,53
16-18 Tahun	65,25	66,68	68,17	67,34	66,68	66,93
APM						
SD	97,12	97,15	97,84	98,22	97,48	97,72
SMP	67,91	80,43	81,82	66,43	74,23	74,08
SMA	62,61	54,72	64,40	59,28	63,48	56,45

Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2022-2023

Berdasarkan tabel 4.3, pada tahun 2023, penduduk usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah (laki-laki dan perempuan) adalah sebesar 0,81%. Angka ini lebih tinggi sedikit dibanding tahun 2022 yang bernilai 0,78%. Artinya ada penurunan tingkat partisipasi penduduk 7-12 tahun yang bersekolah. Selanjutnya pada kelompok usia 13-15 tahun, penduduk yang belum mengenyam pendidikan, yaitu sebesar 3,47%. Nilai ini sedikit lebih kecil dibanding tahun 2021 (3,39%). Walaupun relatif kecil, namun terdapat penurunan penduduk usia 13-15 tahun yang belum/tidak bersekolah. Kemudian pada kelompok usia 16-18 tahun, masih terdapat 33,07% penduduk yang belum mengenyam pendidikan. Nilai ini meningkat sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang nilainya 33,02%. Tabel 4.3 juga menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah penduduk perempuan tahun 2023 lebih besar daripada penduduk laki-laki pada semua kelompok umur.

Pada tahun 2023, APM terbesar berada pada jenjang SD dengan nilai 97,72%, dimana APM penduduk perempuan lebih tinggi (98,22%) dibanding penduduk laki-laki (97,15%). Berikutnya adalah APM jenjang pendidikan SMP yang memiliki nilai 74,08% dengan APM penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Dan APM terendah adalah jenjang pendidikan SMA sebesar 56,45%, dengan APM perempuan lebih tinggi dibanding APM laki-laki. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai APM tingkat SD tahun 2023 lebih besar dari tahun 2022, baik itu pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan nilai APM tahun 2023 jenjang SMP dan SMA secara keseluruhan lebih rendah daripada tahun 2021.

APM menunjukkan partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan tepat waktu. Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, pada tahun 2023, APM penduduk perempuan lebih besar daripada APM penduduk laki-laki pada semua kelompok umur. Hal ini juga butuh perhatian tersendiri dari pemerintah, karena laki-laki yang nantinya akan menjadi tulang punggung keluarga juga harus memperhatikan tingkat pendidikannya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depannya.



BAB 5 PERUMAHAN



Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat selain sandang dan pangan. Tak hanya untuk tempat berlindung, rumah juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan estetika bagi sebagian masyarakat menjadi pertimbangan dalam pemilihan rumah untuk keluarganya. Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan yang sehat, aman, lestari diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Perumahan terkait erat dengan kesehatan. Struktur, lokasi, fasilitas, lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh yang kuat pada keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Kondisi dan penggunaan perumahan yang buruk dapat memberikan perlindungan yang lemah terhadap penyakit. Demikian sebaliknya, kondisi perumahan yang layak tidak hanya dapat melindungi orang terhadap bahaya kesehatan, tetapi juga mendukung produktivitas ekonomi, kesejahteraan psikologis dan kekuatan sosial.

Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga berfungsi sebagai tempat untuk berinteraksi antar anggota rumah tangga dalam suasana yang nyaman dan sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung beberapa fasilitas perumahan yang tersedia, antara lain sarana penerangan yang cukup, air bersih untuk keperluan minum dan masak, serta tersedianya fasilitas jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Aksesibilitas anggota rumah tangga dan derajat kesehatan anggota rumah tangga yang tinggal didalamnya.

Unsur perumahan merupakan salah satu indikator kesejahteraan bagi pemiliknya. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian individu. Selain itu, kondisi rumah juga memengaruhi produktivitas dan kreativitas kerja seseorang. Rumah memiliki fungsi strategis sebagai pusat

pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan papan, maka diharapkan akan terwujud kesejahteraan rakyat yang semakin membaik.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No.14 tahun 1992 menyatakan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan yang dimaksud adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Beberapa fasilitas perumahan yang dijadikan sebagai indikator untuk mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah status kepemilikan rumah, sumber air minum dan sanitasi. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

5.1 Kepemilikan Rumah

Kondisi ekonomi suatu keluarga akan memberikan pengaruh terhadap status kepemilikan rumah. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan kondisi yang baik dan permanen. Berbeda halnya dengan keluarga yang berpenghasilan lebih rendah.

Lebih dari itu, status kepemilikan rumah akan berpengaruh pada kualitas rumah. Hal ini disebabkan karena adanya rasa memiliki akan membuat kecenderungan lebih besar untuk senantiasa memperbaiki kualitas rumahnya dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di rumah dengan status bukan milik sendiri.

Pada tahun 2023, total rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 96,85%. Sedangkan 3,15% rumah tangga lainnya tinggal di rumah dengan status kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, lainnya. Mengamati lebih lanjut pada tabel 5.1, dengan klasifikasi jenis kelamin KRT terlihat bahwa persentase rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki lebih banyak yang menempati rumah dengan status milik sendiri, yaitu mencapai 96,94%. Sedangkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah dengan status milik sendiri sebanyak 95,97%.

Tabel 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023

Jenis Kelamin KRT	Status Kepemilikan Bangunan	
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri*
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	96,94	3,06
Perempuan	95,97	4,03
Kolaka Timur	96,85	3,15

Catatan: *) termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat, dll
 Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Ketika diamati melalui karakteristik taraf ekonomi rumah tangga (tabel 5.2), kepemilikan rumah sendiri paling banyak pada masyarakat dengan 20 persen ekonomi teratas dengan nilai 99,22%, sedangkan yang bukan milik sendiri sebesar 0,78%. Kelompok 40 masyarakat terbawah menjadi kelompok masyarakat yang persentase tinggal di rumah sendiri paling rendah, yaitu sebesar 94,10%, sedangkan yang tinggal di bangunan bukan milik sendiri sebesar 5,90%. Salah satu yang menjadi faktor penyebabnya karena kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi teratas memiliki penghasilan yang bisa dipakai untuk membeli/membangun tempat tinggal miliknya dengan lebih leluasa dibanding kelompok masyarakat ekonomi bawah. Akan tetapi, pada umumnya, yang terjadi di

tengah-tengah masyarakat, kepemilikan rumah sendiri berasal dari warisan, dimana hal ini tidak dipengaruhi oleh karakteristik tertentu di rumah tangga.

Tabel 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023

Kelompok Pengeluaran	Status Kepemilikan Bangunan	
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri*
(1)	(2)	(3)
40 Persen Terbawah	94,10	5,90
40 Persen Tengah	97,61	2,39
20 Persen Teratas	99,22	0,78
Kolaka Timur	96,85	3,15

Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

5.2 Sumber Air

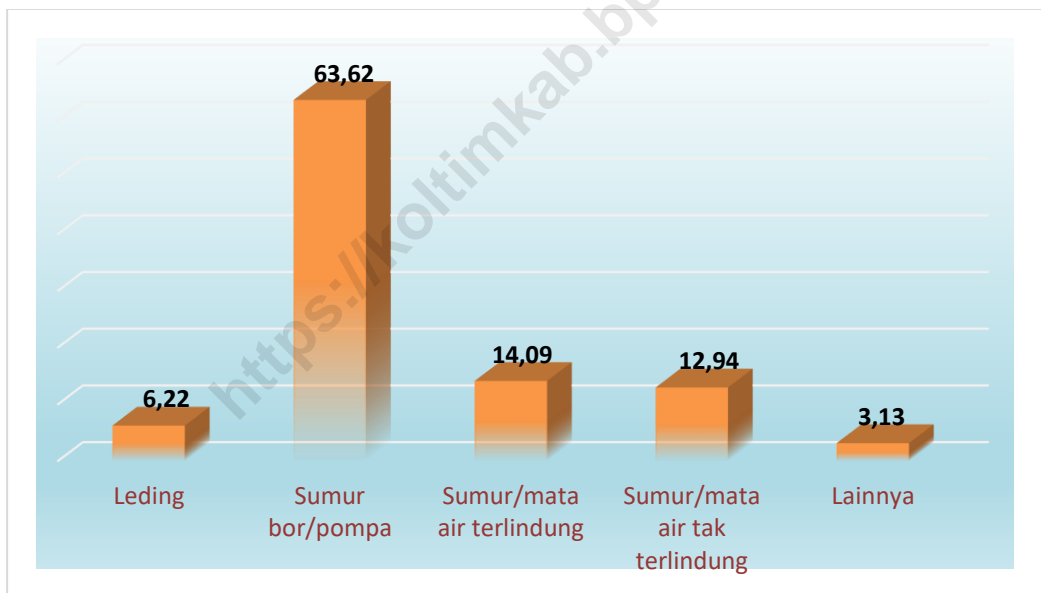
Organisasi Kesehatan Internasional (WHO), menyebutkan bahwa perumahan yang layak harus dapat memberikan perlindungan dari paparan penyakit menular. Salah satunya yaitu melalui pasokan sumber air minum yang bersih dan sehat.

Air merupakan salah satu kebutuhan vital dalam kelangsungan hidup manusia yang utamanya digunakan untuk minum, memasak, mandi, cuci, dll. Kualitas air yang digunakan berkaitan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat. Air yang bersih dan sehat adalah air yang terbebas dari kuman-kuman penyebab penyakit. Bila sumber airnya tercemar oleh kotoran, maka dikhawatirkan air yang dihasilkannya pun akan tercemar.

Ketersediaan air yang cukup untuk setiap rumah tangga menjadi sesuatu yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Sumber air yang digunakan sangat bervariasi bergantung pada ketersediaan akses serta kondisi sosial, ekonomi, dan letak geografis rumah tangga tersebut. Kelayakan air

yang dikonsumsi rumah tangga juga perlu mendapatkan perhatian karena berhubungan langsung dengan tingkat kesehatan anggota rumah tangga. Keberadaan sumber air dengan jarak yang terlalu dekat dengan tempat penampungan tinja/limbah/kotoran membuka peluang tercemarnya air tersebut oleh sumber penyakit yang menyebar melalui perantara kotoran atau perantara air. Sumber air yang utamanya digunakan untuk minum dan memasak dapat dikatakan aman dari kontaminasi jika berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan tinja/limbah/kotoran terdekat.

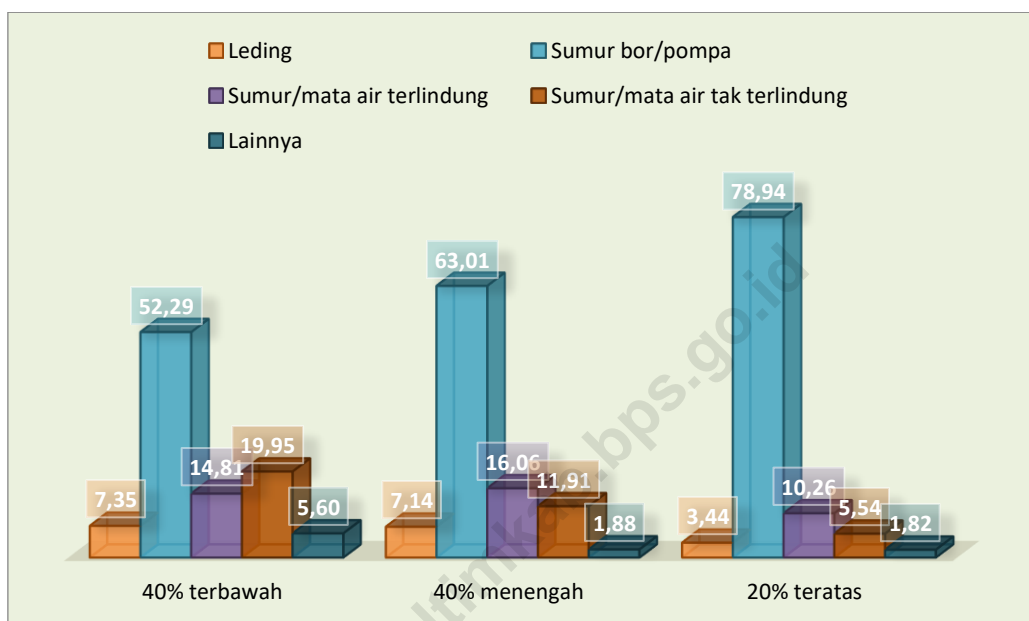
Gambar 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/lainnya di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Sumber air terbanyak yang digunakan oleh penduduk Kabupaten Kolaka Timur untuk mandi/cuci/lainnya adalah sumur bor/pompa, yaitu mencapai 63,62%. Selanjutnya diikuti oleh sumur/mata air terlindung di urutan kedua terbanyak yang digunakan dengan besaran nilai 14,09%. Sisanya adalah mereka yang menggunakan sumur/mata air tak terlindung (12,94%), leding (6,22%) dan sumber lainnya seperti air hujan, dll (3,13%).

Gambar 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/lainnya di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

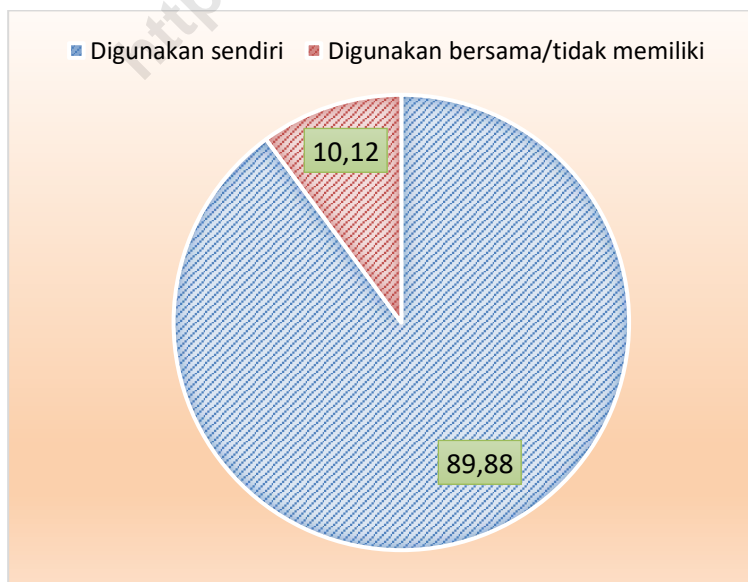
Pada setiap kelompok masyarakat, baik itu ekonomi bawah, menengah ataupun 20% teratas, sumber air utama yang banyak digunakan untuk mandi/cuci/lainnya adalah sumur bor/pompa dengan besaran nilai masing-masing 52,29%, 63,01%, 78,94%. Diurutan kedua adalah sumber air utama yang berasal dari sumur/mata air terlindung, dengan besaran nilai masing yaitu 14,81% untuk kelompok ekonomi 40% terbawah, 16,06% untuk kelompok ekonomi 40% menengah, dan 10,26% untuk kelompok ekonomi 20% teratas. Dari gambar 5.2 dapat dilihat pula bahwa rumah tangga yang menggunakan air leding sebagai sumber air utama hanya sekitar 3-7 persen pada semua kelompok pengeluaran. Hal ini disebabkan karena distribusi air leding yang masih belum merata dan belum terlalu menjangkau wilayah pedesaan. Kualitas air leding yang didistribusikan juga belum maksimal sehingga banyak masyarakat yang beralir ke sumur bor/pompa dan sumur/mata air terlindung.

5.3 Sanitasi

Diantara infrastruktur dasar rumah tangga adalah air bersih, listrik, gas, dan pembuangan limbah rumah tangga atau sanitasi. Sebuah rumah tangga dikategorikan memiliki fasilitas sanitasi yang layak apabila rumah tangga tersebut minimal memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja yang menggunakan tangki septik.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting perannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai penyakit seperti tipus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Gambar 5.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023



Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Pada tahun 2023, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kolaka Timur sudah menggunakan fasilitas buang air (jamban) sendiri dan digunakan sendiri, yaitu sebesar 89,88%. Secara umum, sudah banyak terlihat kemajuan berkaitan dengan fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh masyarakat. Meskipun persentase rumah tangga yang menggunakan MCK dengan fasilitas digunakan bersama/umum atau tidak menggunakan jamban sudah menurun, angkanya masih cukup besar, yaitu 10,12%. Hal ini berarti dalam setiap 100 rumah tangga, setidaknya 10 diantaranya masih menggunakan fasilitas MCK bersama/MCK umum atau bahkan belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian masyarakat dan pemerintah setempat, mengingat pentingnya kebersihan sanitasi untuk menciptakan masyarakat dengan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit.

Pada umumnya, kepedulian masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas sanitasi di rumah tangganya, juga dipengaruhi oleh pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT. Ketika rumah tangga dikelompokkan menjadi dua berdasarkan pendidikan tertinggi KRT nya, maka diperoleh informasi sebagaimana tersaji dalam tabel 5.3 di bawah.

Tabel 5.3. Persentase Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Pendidikan Tertinggi KRT di Kabupaten Kolaka Timur (Persen), 2023

Karakteristik	Kepemilikan Fasilitas Tempat BAB	
	Sendiri	Lainnya*
(1)	(2)	(3)
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	80,80	19,20
40 Persen Menengah	93,49	6,51
20 Persen Teratas	96,13	3,87
Pendidikan Tertinggi KRT		
Tamat SD ke bawah	87,42	12,58
Tamat SMP ke atas	92,79	7,21

Catatan: *) Lainnya termasuk fasilitas bersama rumah tangga tertentu, MCK komunal, MCK umum, tidak menggunakan, atau tidak ada fasilitas tempat buang air besar

Sumber: BPS, Hasil Olah Susenas Maret 2023

Pada tabel 5.3 memperlihatkan bahwa semakin tinggi pendidikan KRT semakin besar pula kepedulian mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sanitasi. Karena rumah tangga dengan pendidikan tertinggi KRT tamat SMP ke atas adalah kelompok yang paling besar persentase kepemilikan fasilitas BAB yang dipakai sendiri, yaitu dengan besaran nilai 92,79%. Sedangkan rumah tangga dengan pendidikan KRT tamat SD ke bawah memiliki besaran nilai 87,42%, selisih 5,37% dibanding KRT dengan pendidikan SMP ke atas.

Bila dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar kepemilikan fasilitas tempat BAB yang menggunakan untuk rumah tangga itu sendiri adalah kelompok 20% teratas, dengan besaran nilai 96,13%. Artinya dari 100 rumah tangga, kurang lebih 96 rumah tangga di kelompok masyarakat teratas sudah memiliki fasilitas jamban yang digunakan sendiri oleh rumah tangga yang bersangkutan. Urutan kedua adalah kelompok 40% menengah dengan besaran nilai 93,49%. Dan kelompok 40% masyarakat terbawah memiliki persentase kepemilikan fasilitas jamban yang digunakan sendiri sebesar 80,80%.

Berdasarkan tabel 5.3 tersebut, bisa dilihat bahwa pemerintah daerah setempat masih harus bekerja keras untuk memastikan agar tidak ada warganya yang kondisi perumahan, khususnya masalah sanitasi, jauh dari kata layak. Agar dana desa bisa lebih dimanfaatkan untuk program-program yang dirasakan sendiri manfaatnya oleh warga desa tersebut, salah satunya dengan bantuan pembangunan fasilitas BAB untuk masyarakat yang kurang mampu, atau bila merujuk ke tabel 5.3 adalah mereka yang masuk kelompok ekonomi 40% terbawah.



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



kompleks perkantoran Lalingato,
Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur



www.koltimkab.bps.go.id